

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Oleh

SATRIA RAHMADANI PUTRA

Upaya Pemerintah dalam mengatasi permasalahan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis selalu menemukan hambatan. Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, akan tetapi berdasarkan data menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis justru mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Faktor-Faktor Penghambat yang diungkapkan oleh Darwin yaitu aspek Kepentingan, Azas Manfaat, Budaya, Aparat Pelaksana dan Anggaran. Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara

dan data yang diperoleh dari hasil penelitian akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan simpulan bahwa penghambat pelaksanaan Perda tersebut dikarenakan adanya kepentingan dari orang atau sekelompok yang mendapatkan keuntungan dari keberadaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis tersebut. Disisi lain masyarakat belum mengetahui maksud dan tujuan dari Perda, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Mentalitas para Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis untuk meminta-minta, serta budaya masyarakat yang masih memanjakan. Kemudian penegakan sanksi Perda, baik berupa denda maupun hukuman kurungan oleh aparat pelaksana yang belum berjalan, serta anggaran yang sangat terbatas, terutama dalam hal pembangunan panti penampungan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Kata kunci : kemiskinan, kebijakan.